

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah (ed). 1986. *Undang-Undang Baru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Serta Bea Materai*. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur.
- Christian P.P, (dkk). 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2019-2013*. Forest Watch Indonesia. Bogor.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Ilmi Usrotin Choiriyah dan Lailul Mursyidah. 2020. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. UMSIDA Press. Sidoarjo.
- Irfan Setiawan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Wahana Resolusi. Yogyakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Penulisan Artikel* Edisi Ketiga. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Lusi Ardiaputri, (et.al). 2021. *Buku Saku Fasilitas Permohonan Hutan Kemasyarakatan*. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan, Kemitraan Lingkungan. Jakarta.
- Marihot P. Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University. Press. Nusa Tenggara Barat.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawari Djafar. 2012. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- . 2021, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Edisi Ketiga. Depok.

- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng. 2010. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Rajawalo Pers. Jakarta.
- Muhammad Djafar saidi. 2014. *Edisi Terbaru Pembaruan Hukum Pajak*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. 2019. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ruandha Agung (et.al). 2018. *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Sulistya Ekawati. Didik Suharjito. dan Syaiful Anwar. 2019. *Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi*. PT. Kanisius. Bogor.
- Sulistya Ekawati. (et.al)f. 2020. *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Suparno. 2012. *"Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas"*. Pustaka Magister. Semarang.
- Yuli Neta, Hari Kaskoyo, dan Dian Agungan. 2019. *Hutan Kemasyarakatan "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri"*. Pustaka Media. Bandar Lampung.
- Mouna Wasef dan Firdaus Ilyas. 2011. *Merampok Hutan dan Uang Negara (Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan (Studi kasus di di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)*. Kontak Rakyat Borneo. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.
- Christian P.P, (dkk). 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2019-2013*. Forest Watch Indonesia. Bogor.

Skripsi

- Siti Hardiyanti Dumbi. 2017. *Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan PerKotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*.

Skripsi. Program Studi Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Widyawati Bahar. 2019. *Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Enreekang menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011*. Skripsi. Program Studi Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal

Devi Taurisa. "Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonom Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha". University of Bengkulu Law Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 5. Nomor 1 Oktober 2020.

Eddy Rahmawan. "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Universitas Lambung Mangkurat, Vol. I. Edisi 2. Juli-Desember 2012.

Fajlurrahman Jurdi. "Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial)". Jurnal Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas. Vol. 25 Nomor 2 September 2017.

Muhammad Ilham Arisaputra, Sri Wildan Ainun Mardiah. "Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Suatu Komparatif". Jurnal Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas. Vol.27. Nomor 2 September 2019.

Nanik Ermawati dan Amin Kuncoro. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember". Jurnal STIE Semarang, Vol. 9. Nomor 1 Februari 2017.

Sabaria Niapele. "Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan". Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (agrikan UMMU-Ternate). Vol. 7 Nomor 1 Mei 2014.

Sulmayani, Achmad Ruslan, Ruslan Hambali. "Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual". Al-AzharJurnal of Islamic Economics. Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah

Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. Vol. 2. Nomor 1 Januari 2020.

Wahyu Yun Santoso dan Adrianto Dwi Nugroho. "Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21. No. 3, Oktober 2009.

Laporan Penelitian

Erna Rosdiana. *Proyek Perubahan Tata Kelola Baru Pelayanan Akses Legal Perhutanan Sosial 4.0 (Jarengjebol Hutsos 4.0)*. Laporan Penelitian. Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Angkatan 8 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Pocut Eliza, (et.al). 2017. Makalah. " Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan". Laporan Penelitian. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta. Desember.

Makalah

Dian Kagungan. Makalah. "Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Internet

<http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/detail/638201772>
(Sinpasdok KPH Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014.

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014, Nomor 10 Tahun 2014. tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Luar Pulau Jawa dan Bali

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032

SK Menteri LHK No. SK. 6877/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019 tentang Pemberian IUPHKm kepada KTH Bunga Harapan seluas ± 153 hektar pada kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan

LAMPIRAN

1.1 Surat Izin Penelitian



Bulukumba, 13 Mei 2022

Nomor : 280/DPMP/SP/TKV/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/343/Kesbangpol/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : AQILA
Nomor Pokok : B021181019
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Institusi : UNHAS MAKASSAR
Alamat : JL. DAMAI L.R. 2 TAMALANREA UNHAS
MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam rangka SKRIPSI dengan judul "PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS KECAMATAN BULUKUMPA)" yang akan berlangsung pada tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



FERRYAWAN Z. FAHMI, S.STP., M. AP
Pangkat : Pembina Tk.I
No. : 19820212 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.

1.2 Surat Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Menjadi

Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHRIANA SAIB, S. Hut. M.M

Pekerjaan/Jabatan : Kabid Pendataan & Pengembangan Pendapatan

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila

NIM : B021181019


Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Mei 2022, bertempat di Kantor BPKPD

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber


SAHRIANA SAIB, S. Hut. M.M

Nip. 19750101 200003 2 010


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Aqila** yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber


SAHRIANA SAID, S.HU, M.M

Nip. 19750101 200003 2010.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AWALUDDIN ASNUR
Pekerjaan/Jabatan : PNS / STAFF KANTOR BPKPD.

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

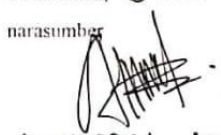
Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 10 Mei 2022, bertempat di Kantor BPKPD.

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan-Bulukumpa).**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 10 Mei 2022

narasumber


AWALUDDIN ASNUR

Nip. 19830704 200502 1002

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Aqila** yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber


AWAUDIN ASSNUR

Nip. 19830704 200502 1002.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Mardiani Mardin, S.Hut., M.Si
Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Kehutanan

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:


Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Mei 2022, bertempat di SEKRETARIAT KTH BUNGA HARAPAN

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumpa,
narasumber



Eka Mardiani Mardin

Nip. 19830822 200804 2002

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).**

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber



Eka Mardiani Mardin

Nip. 19830822 200804 2002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Akhdar, SE JAWI-JAWI
Pekerjaan/Jabatan : LURAH, KEURAHAN ~~KEURAHAN~~

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 12 Mei 2022, bertempat di Kantor lurah jawi-jawi

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,



H. AKHDAR, SE

1270326 1992031009

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).**

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRSYAM SH
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kampung


Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 Juli 2022, bertempat di Kampung Karu. Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber



IRSYAM SH

Nip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).**

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

narasumber


Irsyam SH

Nip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muhammad Yasu*

Pekerjaan/Jabatan : *Pelani/Ketua RW*

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : *Aqila*

NIM : *B021181019*

Fakultas/Prodi : *Hukum/Huku Administrasi Negara*

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *4 Juli 2022* bertempat di *Kampung Bunga Harapan*

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



Muhammad Yasu

Nip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan


Muhammad Yasin

Nip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Halim

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila

NIM : B021181019

Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11 Mei 2022, bertempat di SEKRETARIAT KTH Bunga Harapan
Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa).

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber



Abdul Halim
Nip.


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Aqila** yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber

 ABDUL HALIM

Nip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Nursida*
Pekerjaan/Jabatan : *Ibu Rumah Tangga*

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila
NIM : B021181019
Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *11 Mei 2022*, bertempat di *Sekretariat KTH Bunga Harapan*

Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul *Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber



Nursida

Nip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,
narasumber

 Nursida

Nip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HUSDAR

Pekerjaan/Jabatan : PEJABAT

Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Aqila

NIM : B021181019

Fakultas/Prodi : Hukum/Huku Administrasi Negara

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 Juli 2022, bertempat di Bunga Harapan Dalam rangka melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

Informan



Nip.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Aqila yang berjudul **Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumba)**.

saya memahami ahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative terhadap diri saya dan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba,

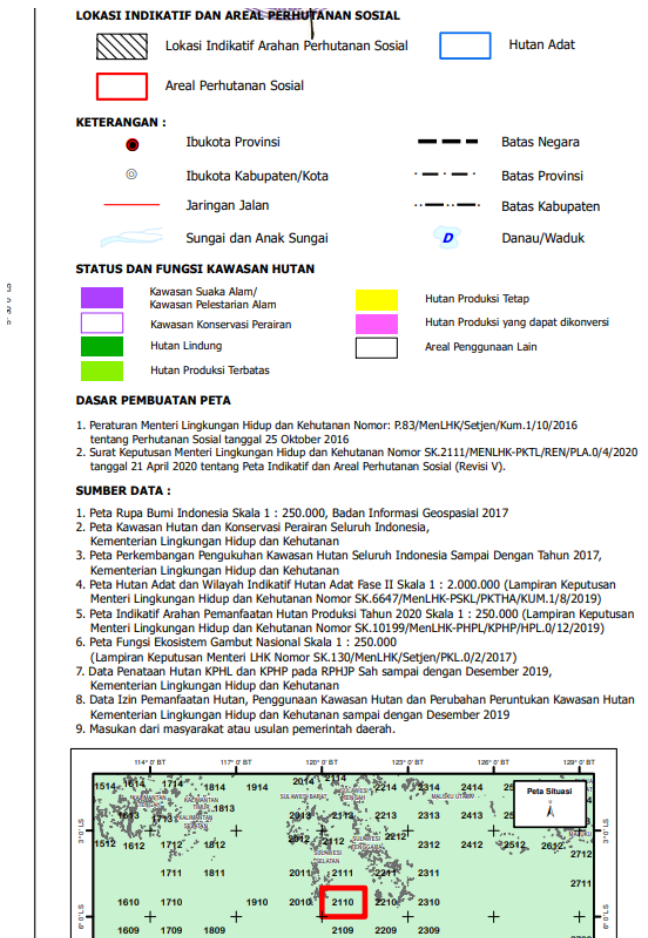
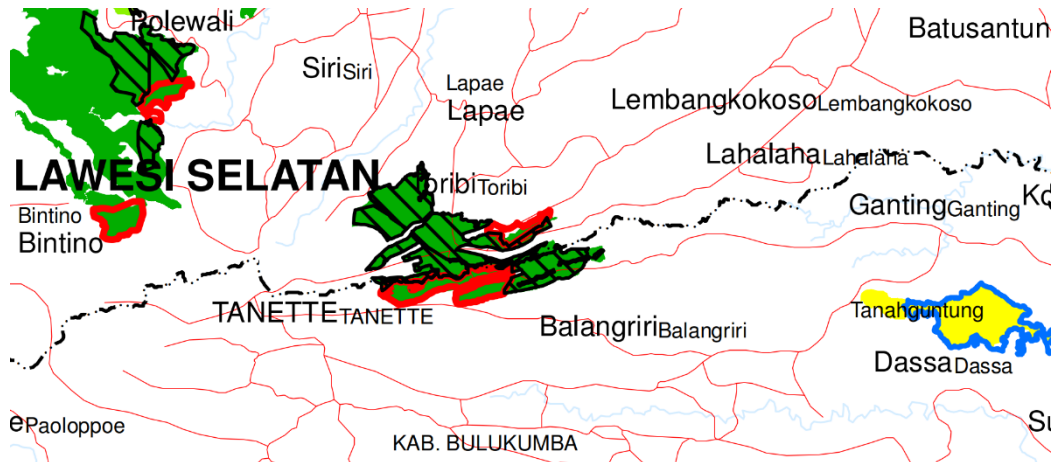
Informan



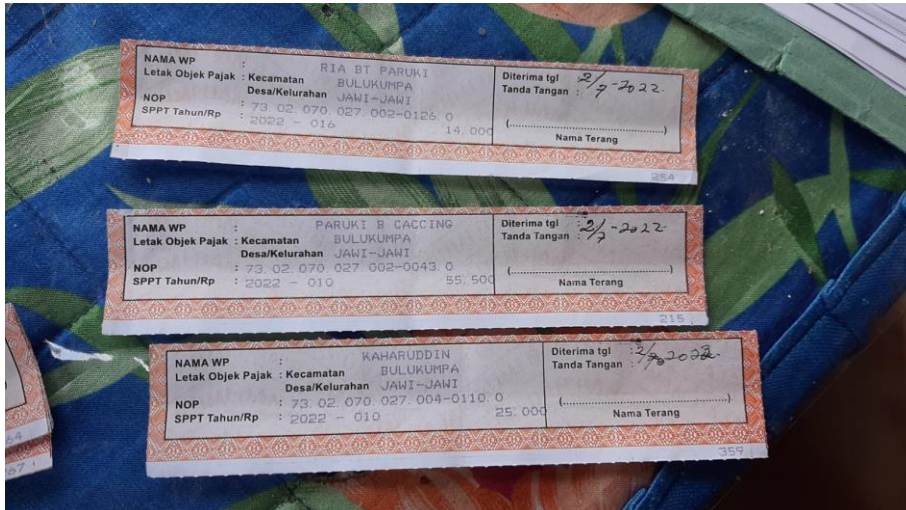
Nip.

1.3 Peta Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bulukumpa dengan

Izin HKm



1.4 Dokumentasi Penelitian



NOPEK	NOP	NOMOR PISOR	NAMA WALIS PAJAK	ALAMAT WALIS PAJAK	PAJAK	DAFTAR
903.005.0127-0			SHARUDDIN ABU	KP BARU	31.000	
903.005.0128-0			TAMBUKUDIN	1.2. KP BARU	44.000	
903.005.0129-0			TAGAWA B BABRYU	KP BARU	223.340	
903.005.0130-0			SAMRUDIN	1.2. KP BARU	40.000	
903.005.0131-0			HANIS S BACD	KP BARU	40.000	
903.005.0132-0			RAFFEL B JASSA	1.2. KP BARU	28.000	
903.005.0133-0			SALE B HAPPA	KP BARU	21.000	
903.005.0134-0			OLAKA S BAPPA	KP BARU	19.000	
903.005.0135-0			ANLUDDIN	KP BARU	41.500	
910.005.0148-0			LUPE Z BAPPE	1.2. BUNGA HARAPAN	20.000	
910.005.0147-0			ABD HUIS	1.2. KP BARU	11.250	
910.005.0149-0			SLIYATI ST SABANG	KP BARU	11.250	
910.005.0149-0			A SURIANI BT SABANG	KP BARU	42.000	
910.005.0150-0			PALEMAI	KP BARU	10.000	
910.005.0151-0			H SUDEHMAN	1.2. KP BARU	44.000	
					29.312.843	



